

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistemik terhadap keuangan negara dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp285,18 triliun, yang melibatkan penyimpangan kegiatan ekspor-impor minyak mentah, pengapalan, serta manipulasi harga jual bahan bakar minyak. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kasus korupsi pengelolaan minyak mentah dalam kasus pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah penerapan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap korporasi sebagai subjek hukum serta teori terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi tambahan berupa perampasan hasil tindak pidana dan pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dapat dikenakan secara ganda, baik terhadap individu maupun korporasi, karena perbuatan dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan sanksi pidana terhadap korporasi negara guna memperkuat prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang bersih di sektor migas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Korupsi, Minyak Mentah, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that has a systemic impact on state finances and national economic stability. This study aims to analyze corporate criminal liability in the alleged corruption case of crude oil management by PT Pertamina Patra Niaga. This case was handled by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia with state losses reaching Rp285.18 trillion, which involved irregularities in crude oil export-import activities, shipping, and manipulation of fuel oil selling prices. Therefore, the formulation of the problem in this study focuses on who can be held criminally responsible for the corruption case of crude oil management in the case of crude oil management by PT Pertamina Patra Niaga.

The type of research used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, sources of legal materials consist of primary legal materials in the form of laws and regulations related to the eradication of criminal acts of corruption and secondary legal materials in the form of legal literature. The collection of legal materials was carried out through literature studies and analyzed descriptively-analytically by examining the application of the provisions of Article 2, Article 3, and Article 18 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with. Law Number 20 of 2001 on corporations as legal subjects and theories related to corporate criminal liability.

The results of this study indicate that the actions committed by corporate managers fulfill the elements of unlawful acts, enriching oneself or others, and abuse of authority as stipulated in Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law. Furthermore, Article 18 of the Corruption Eradication Law provides the legal basis for the imposition of additional sanctions in the form of confiscation of the proceeds of crime and payment of restitution as a form of restitution of state finances. Criminal liability in this case can be imposed dually, against both individuals and corporations, because the actions were committed for the benefit of the company. Thus, this study emphasizes the importance of imposing criminal sanctions on state corporations to strengthen the principles of accountability and clean governance in the oil and gas sector.

Keywords: *Corruption, Criminal Liability, Corporations, Corruption, Crude Oil, Corruption Eradication Law.*